



PANCASILA MENYEBAR KE 45 KELURAHAN

Hasto Tekankan Tidak Ada Warga yang Ditinggalkan di Kota Jogja



meningkatkan kesulitan hidup.

Dalam momentum Hari Lahir Pancasila, pesan itu menjadi semakin kuat. Pancasila tidak boleh berhenti sebagai teks upacara, hafalan sekolah, atau kalimat yang dibacakan setahun sekali. Pancasila harus turun ke kampung, masuk ke rumah-rumah warga, hadir di dapur keluarga miskin, teras dalam layanan publik, dan bekerja dalam program pembangunan. Di situ lah gotong royong menemukan makna yang paling jernih. Ia bukan sekadar kerja bakti membawa sapu, bukan pula hanya tradisi lama yang di-ngeang dengan romantis. Gotong royong adalah cara bangsa ini memastikan bahwa hidup bersama tidak berubah menjadi pertunjukan saling meninggalkan. Dalam gotong royong, yang kuat membantu yang lemah. Yang punya ruang berbagi kepada yang sempit. Yang punya ilmu mendampingi yang belum mampu. Yang punya kewenangan memastikan kebijakan tidak buta terhadap kebutuhan warga.

Hasto membaesa gotong royong sebagai rangkaian nilai yang menghubungkan sila pertama hingga sila kelima. Ada keimanan yang melahirkan ketuhanan. Ada kemanusiaan yang menuntut kepedulian. Ada persatuan yang menegakkan warga teresa-bera. Ada musyawarah yang menjaga perbedaan tetap sehat. Dan pada akhirnya, ada keadilan sosial yang menjadi tujuan bersama.

Maka, ketika Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan program bedah rumah, yang terjadi bukan hanya perbaikan bangunan fisik. Di sana ada pesan bahwa rumah layak bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar martabat manusia. Warga yang rumahnya tidak sehat tidak boleh dibiarkan sendirian menanggung nasib. Pemerintah, Baznas, BUMD, swasta, warga sekitar, dan berbagai pihak dapat masuk dalam satu lingkaran napas gotong royong: memperbaiki tempat tinggal, menjaga kesehatan keluarga, sekaligus mengangkat kembali rasa percaya diri warga.



Hasto Wardoyo berinteraksi dengan anak TPA.

KR-Istimewa

Begitu pula dengan kurve plus atau kerja bakti yang kini didorong bukan hanya untuk membersihkan lingkungan, tetapi juga untuk menemukan dan menyelesaikan persoalan sosial. Jalan yang bersih memang penting. Trotoar yang rapi memang perlu. Tetapi lebih dari itu, kerja bakti membuka ruang pertemuan. Saat aparat turun ke wilayah, mereka tidak hanya melihat rumput liar atau sampah daun, tetapi juga melihat langsung denyut kehidupan masyarakat. Dari situ lah kebijakan bisa menjadi lebih peka.

Di bidang lingkungan, semangat yang sama terlihat dalam Mas.JOS. Masyarakat Jogja Olah Sampah. Program ini mengajak warga memilah sampah, membawa anorganik ke bank sampah, mengolah organik, menghabiskan makanan, dan menggunakan wadah berulang. Sekilas terlihat sebagai gerakan teknis pengelolaan sampah. Namun secara filosofis, Mas.JOS adalah pendidikan kewargaan ekologis. Warga diajak tidak menjadi penonton atas masalah kota, tetapi menjadi pelaku perubahan dari rumah masing-masing.

Dalam ekonomi kerakyatan, semangat gotong royong juga hadir melalui gerakan seperti Gandeng Gandeng. Pemerintah, kampus, kampung, korporasi, dan komunitas dipertemukan agar kekuatan kecil

tidak berjalan sendiri-sendiri. UMKM warga dilibatkan, produk lokal dilirik, kelompok rentan diberi ruang untuk naik kelas. Pesannya jelas: pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan yang sudah kaya, tetapi harus membuka jalan bagi yang selama ini berada di pinggir.

Prinsip yang sama juga tampak dalam penanganan kelompok rentan. Penyandang disabilitas, warga miskin, anak-anak, lansia, dan keluarga yang mengalami kerentanan sosial harus berada di pusat perhatian kebijakan. Sebab ukuran keberhasilan kota bukan hanya dilihat dari wajah pusat kotanya, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan warganya yang paling membutuhkan.

Di titik ini, "no one left behind" bukan istilah asing yang jauh dari budaya kita. Dalam bahasa kerakyatan Jogja, ia dekat dengan rasa "aja nganti ana sing ketillar". Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai kemajuan hanya menjadi kabar baik bagi sebagian orang. Jangan sampai pembangunan melesat, tetapi ada warga yang masih terperosok dalam kesulitan tanpa tangan yang menolong.

Tentu, gotong royong tidak berarti menghapus peran negara. Justu sebaliknya, negara harus hadir sebagai penggerak, penghubung, dan penjaga arah. Pemerintah memimpin orkestrasi, tetapi masyarakat ikut memainkan nadanya. Birokrasi merancang kebijakan, tetapi warga memberi nyawa. Dunia usaha membantu sumber daya, komunitas mengulangi pendampingan, lembaga sosial menutup celah, dan kampung menjadi ruang hidup tempat semua itu diuji.

Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak berhenti di lapangan upacara, ia harus bergerak menjadi kesadaran baru bahwa Pancasila paling nyata ketika warga yang kesusahan tidak dibiarkan sendirian. Pancasila paling terasa ketika rumah reyot diperbaiki bersama, lingkungan dibersihkan bersama, sampah diolah bersama, UMKM dilibatkan bersama, dan masalah sosial diselesaikan bersama.

Jogja tidak boleh menjadi kota yang hanya nyaman bagi wisatawan, tetapi juga harus nyaman bagi warganya sendiri. Nyaman bagi anak-anak untuk tumbuh. Nyaman bagi lansia untuk menua. Nyaman bagi penyandang disabilitas untuk bergerak. Nyaman bagi warga miskin untuk tetap memiliki harapan. Nyaman bagi siapa pun yang ingin hidup bermartabat.

Di sinilah gotong royong menjadi jalan tengah antara idealisme dan tindakan. Ia membuat Pancasila tidak berhenti sebagai lambang, tetapi menjadi laku. Ia membuat pembangunan tidak sekadar menjadi proyek, tetapi menjadi gerakan. Dan ia membuat kesejahteraan tidak hanya menjadi janji, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Sebab kota yang benar-benar berarti nyaman bukan kota yang paling megah bangunannya, melainkan kota yang paling sungguh-sungguh memastikan tidak ada warganya yang ditinggalkan. ☑

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005